

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gereja merupakan salah satu organisasi nirlaba yang dapat dipandang sebagai salah satu unit usaha sosial yang juga menggunakan prinsip-prinsip suatu organisasi dengan sistem manajemen untuk mencapai tujuannya. Gereja memperoleh sumber daya yang digunakan untuk berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan yang diberikan oleh anggota jemaat gereja dan subsidi yang dilakukan oleh gembala sidang gereja ketika gereja mengalami kesulitan dana untuk memenuhi aktivitas operasinya.

Gereja juga dapat dipandang sebagai suatu unit ekonomi yang memerlukan prinsip-prinsip suatu organisasi serta menjalankan sistem manajemen dalam mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, gereja memerlukan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang memadai untuk dapat membuat keputusan yang efektif dan efisien bagi pertumbuhan gereja tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan gereja, maka masalah yang berkembang semakin beragam, baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif dan hal tersebut memerlukan penanganan yang lebih serius termasuk dalam hal pelaporan keuangannya.

Pelaporan keuangan gereja mempunyai karakteristik yang berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada laba (organisasi komersial), namun juga memerlukan suatu laporan sebagai dasar

pertanggungjawaban. Sasaran utama dari pelaporan keuangan gereja berbeda pada organisasi yang berorientasi pada laba, yaitu para pemegang saham individual. Pihak yang memberikan sumber keuangan tidak menerima imbalan secara langsung baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Gereja memperoleh dana yang sebagian besar didapat dari donasi atau sumbangan dari anggota jemaatnya, sehingga hal ini merupakan suatu tuntutan bagi gereja untuk lebih transparan dalam pengungkapan keuangan gereja yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasi dari gereja. Pengungkapan aktivitas operasi gereja perlu dilakukan secara transparan, hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dari para anggota jemaat yang memberikan dananya untuk kemajuan gereja dalam mencapai tujuannya.

Dalam suatu organisasi nirlaba khususnya gereja, kadang bisa terjadi penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi gereja sebenarnya, yang biasa disebut sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Terlebih lagi, seringkali pengelolaan keuangan dalam organisasi keagamaan merupakan daerah dimana hampir tidak ada pengawasan yang signifikan dari pemerintah (Boston, 1999). Didasari oleh kemungkinan-kemungkinan atas berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam gereja, maka diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang baik untuk semakin meningkatkan kepercayaan dari anggota jemaat dan gembala sidang yang memberikan subsidi kepada gereja.

Seiring dengan pertumbuhan gereja dan kompleksnya masalah yang mungkin dihadapi oleh gereja, maka bentuk pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dilakukan juga turut berkembang. Salah satu bentuk pengendalian internal yang sering digunakan dalam organisasi adalah *good corporate governance* (GCG). *Corporate governance* adalah suatu sistem internal yang meliputi kebijakan, proses, dan individu yang menyediakan kebutuhan para pemegang saham dan *stakeholder* yang lain, dengan cara mengarahkan dan mengendalikan aktivitas manajemen menggunakan kecerdasan, objektivitas, akuntabilitas, dan integritas bisnis yang baik.

GCG merupakan salah satu hasil dari The Sarbanes-Oxley Act of 2002, salah satu undang-undang yang mengatur mengenai peningkatan tanggung jawab dalam organisasi untuk meningkatkan praktek tata kelola mereka dengan keahlian keuangan dan kemandirian yang diperlukan untuk mengawasi kinerja. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya penerapan *good corporate governance* dalam gereja.

Dengan adanya penerapan GCG dalam gereja maka diharapkan agar (1) kinerja gereja lebih meningkat, (2) pengungkapan segala aktivitas operasi gereja yang disampaikan dapat lebih transparan kepada para anggota jemaat dan gembala sektor, (3) agar gereja dinilai mempunyai kinerja dan nilai yang baik dari waktu ke waktu. GCG juga diharapkan dapat mencegah terjadinya *agency conflict* antara pihak pemilik dan manajemen

gereja. Adanya perbedaan antara organisasi nirlaba dan organisasi komersial dalam mekanisme *good corporate governance*, maka diperlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* pada organisasi nirlaba.

Beberapa hal dasar yang dapat dipertimbangkan adalah: (1) adanya pengungkapan yang tepat waktu serta pengungkapan informasi yang transparan mengenai semua hal penting dalam organisasi, mulai dari setiap laporan persembahan yang diberikan oleh anggota jemaat sampai pada beberapa hal terkait pengeluaran gereja (*transparansi*), (2) adanya komite audit (*akuntabilitas*), (3) kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan hukum yang berlaku (*responsibilitas*), serta (4) adanya deskripsi tugas untuk menjaga agar kinerja organisasi berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan (*fairness*).

Penelitian mengenai *good corporate governance* pada organisasi nirlaba berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada organisasi komersial. Penelitian mengenai mekanisme *good corporate governance* pada organisasi komersial telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Darmawati, Khomsiyah, dan Rika (2004), menjelaskan mengenai adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Sementara itu, untuk penelitian yang membahas mengenai *corporate governance* pada organisasi nirlaba dalam hal ini dilakukan pada gereja masih sangat jarang, meskipun telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

Raditya (2010), menjelaskan bahwa *corporate governance* dapat membantu gereja dalam meningkatkan kinerjanya.

Dalam penelitian ini, obyek studi yang digunakan adalah Gereja Bethany Lebak Arum Surabaya. Pemilihan objek studi didasarkan pada pertimbangan kompleksitas struktur, ukuran, dan pertumbuhan gereja yang baik, sehingga dapat dijadikan acuan bagi organisasi nirlaba lainnya. Hal ini juga didasari karena Gereja Bethany Lebak Arum Surabaya telah mendapat hak otonomi dari Sinode Bethany (pusat). Hak otonomi tersebut menunjukkan bahwa gereja telah mampu mengurus rumah tangganya sendiri, dalam hal ini terkait masalah pendanaan dan keuangan gereja. Namun, setiap bulan gereja wajib untuk memberikan 10% persepuluhan pada Sinode Bethany. Persepuluhan ini berasal dari total sumbangan yang didapat gereja dari anggota jemaat gereja. Sumbangan yang diberikan oleh anggota jemaat gereja yaitu berupa (1) persembahan kolekte, (2) persepuluhan, (3) diakonia, (4) ucapan syukur, (5) pembangunan, dan (6) beberapa sumbangan lain terkait acara yang akan diadakan oleh gereja.

Gereja Bethany Lebak Arum Surabaya membuat suatu laporan mengenai persembahan dari setiap dana yang diberikan oleh anggota jemaat. Pelaporan tersebut dibuat secara transparan kepada gembala sektor dan diaken untuk disampaikan kepada jemaat. Setiap bulan sekali gereja mengadakan *fellowship*, yaitu semacam rapat kerja yang dilakukan untuk gembala sidang memberi arahan kepada diaken dan gembala sektor mengenai rencana-rencana gereja ke

depannya. Selain itu gembala sidang juga memberi laporan pertanggung jawaban kepada diaken dan gembala sektor. Laporan ini ditujukan agar gembala sektor dapat memberikan pertanggung jawaban kepada jemaat. Penelitian awal akan dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi mendalam tentang bagaimana gereja menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance*, sehingga didapatkan suatu gambaran mengenai mekanisme penerapan *good corporate governance* pada organisasi nirlaba.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimanakah penerapan prinsip *good corporate governance* pada gereja Bethany Lebak Arum di Surabaya?”

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah informasi mengenai hal-hal penting dalam gereja telah diungkapkan secara transparan dan tepat waktu (transparansi)?
2. Apakah gereja memiliki pedoman perilaku kerja untuk menjaga kinerja organisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (kewajaran)?
3. Bagaimana bentuk pengawasan/supervisi yang dilakukan dalam gereja (akuntabilitas)?
4. Bagaimana kepatuhan gereja terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (responsibilitas)

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini didesain untuk menjelaskan penerapan prinsip *good corporate governance* pada organisasi nirlaba, dengan gereja Bethany Lebak Arum sebagai obyek penelitian. Tujuan tersebut dapat diuraikan melalui penjelasan bukti mengenai:

1. Pengungkapan informasi mengenai hal-hal penting dalam gereja secara transparan dan tepat waktu.
2. Pedoman perilaku kerja untuk menjaga agar kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
3. Pengawasan dan supervisi dalam gereja, meliputi adanya komite audit dan dewan pengawas keuangan untuk menjaga akuntabilitas.
4. Kepatuhan gereja terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada gereja, khususnya mengenai mekanisme penerapan *good corporate governance* pada gereja.

1.4.2. Manfaat Akademis

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tinjauan kepustakaan/referensi yang baru bagi ilmu akuntansi mengenai pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan nirlaba.

2. Manfaat bagi Masyarakat dan Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia; khususnya pada gereja, di samping pengetahuan konseptual yang telah dimiliki.